

PELAYANAN PENANGGULANGAN GIZI BURUK PADA BAYI GIZI BURUK DI PUSKESMAS DESA PURUN KECIL KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH

Oleh:

AGUSTINUS ALHENDRA

NIM. E21112014

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

email:alhendraagus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis pelayanan rawat jalan dalam penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk di Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pelayanan rawat jalan dalam penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk di Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh. Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ratminto mengenai pelayanan yang berorientasi kepada proses, merupakan pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen. Tujuan pelayanan adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan. Perbaikan pelayanan sektor publik merupakan kebutuhan yang mendesak sebagai kunci keberhasilan reformasi administrasi negara. Responsivitas atau daya tanggap pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk yang dilakukan oleh petugas Puskesmas terlihat belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan ketidak-mampuan petugas atau kader Posyandu dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami kasus gizi buruk. Responsibilitas (kesesuaian/kepatuhan) petugas dalam memberikan pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk belum optimal. Hal tersebut terlihat masih ada masyarakat yang mengalami gizi buruk yang ada belum dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai program tersebut. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban petugas dalam memberikan pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk belum sepenuhnya memberikan pertanggungjawaban yang maksimal. Hal tersebut terlihat salah satunya disebabkan adanya perbedaan pelayanan yang mencolok antara masing-masing masyarakat desa dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pelayanan, Penanggulangan, Gizi Buruk

Abstract

This study aims to reveal and analyze outpatient services in the prevention of malnutrition in malnourished infants at Purunkes Village Purun Kecil Village Pinyuh River. The problem in this research is how the outpatient service in malnutrition prevention in malnourished infant at Purunkes Village Purun Kecil Village Pinyuh River. Based on what Ratminto said about process-oriented service, it is a service that is perceived by consumers. The purpose of services is to provide services that can meet and satisfy customers or the community and provide a focus of service to customers. The improvement of public sector services is an urgent need as the key to successful state administration reform. Responsiveness or responsiveness of malnutrition prevention service on infant malnutrition done by Puskesmas officer looks not maximal yet. It is characterized by the inability of officers or cadres Posyandu in preparing the agenda and priority of service in accordance with the needs and aspirations of the community, especially people who have malnutrition cases. Responsibilitas (conformity / compliance) officers in providing services for malnutrition in malnutrition malnutrition is not optimal. It is seen there are still people who have malnutrition that there is not yet able to obtain sufficient information about the program. Accountability or accountability of officers in providing malnutrition prevention services in malnourished infants has not fully provided the maximum accountability. This is apparent one of them is due to the striking service disparity between each village community in its implementation.

Keywords: Care, Prevention, Malnutrition.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaan program penanggulangan gizi buruk masyarakat dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada petugas Puskesmas dalam merencanakan program perbaikan gizi buruk masyarakat sesuai standar pelayanan minimal yang harus ditetapkan di Kabupaten Mempawah. Juknis pelaksanaan program penanggulangan gizi buruk masyarakat secara khusus dimaksudkan untuk memudahkan petugas gizi dalam memberikan perhitungan pelayanan gizi sesuai dengan standar pelayanan minimal, penyusunan rencana kerja dan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal SPM, penilaian pengukuran kinerja, penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan SPM, khususnya penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat. Penanganan gizi buruk secara rawat jalan dan rawat inap merupakan jawaban terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perbaikan Gizi, yaitu setiap anak gizi buruk yang ditemukan harus mendapatkan perawatan sesuai dengan standar.

Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.067 Jiwa dengan 882 Kepala Keluarga serta jumlah penduduk yang memiliki bayi sebanyak 171 orang dan balita sebanyak 202 orang. Kasus gizi buruk yang terjadi di Desa Sungai Purun Kecil sebanyak 14 kasus yang terdiri dari 8 orang bayi dan 6 orang balita. Kasus gizi buruk disebabkan asupan gizi itu kurang dan penyakit. Ketidakmampuan keluarga atau si pengasuh anak memenuhi asupan gizi itu sendiri. Karena kalau asupan gizi kurang maka rentan akan penyakit. Begitu juga memang kalau penyakit mungkin karena lingkungan yang tak mendukung atau faktor lainnya pola asuh yang salah khususnya dalam upaya memberikan makanan gizi berimbang kepada anak. Hal ini menunjukkan 80% penderita gizi buruk memiliki penyakit penyertanya seperti TBC dan lainnya, yang murni karena gizi buruk hanya 3-5 kasus saja.

Terjadinya kasus gizi buruk penyebabnya banyak faktor. Mulai faktor ekonomi, sosial, kesehatan, budaya, lingkungan, hingga perilaku masyarakat khususnya orangtua itu sendiri. Namun sampai saat ini penanganan yang diberikan hanya mampu mengurangi sedikit kasus gizi buruk pada balita. Hal ini membuktikan bahwa penanganan dan pelayanan yang diberikan Puskesmas Sungai Purun Kecil Kecamatan sungai Pinyuh belum mampu menekan jumlah kasus gizi buruk yang ada. Ketidak berhasilan penanganan dan

pelayanan tersebut, dikarenakan:

- Minimnya jangkauan/cakupan pemulihan gizi. Di mana penanganan kasus gizi buruk dilaksanakan agar dapat menjangkau sebanyak mungkin kasus gizi buruk yang membutuhkan perawatan.
- Ketepatan waktu yang belum memadai dalam penemuan kasus gizi buruk secara dini sehingga bisa dilakukan penanganan lebih awal dan bersifat komprehensif.
- Pelayanan yang belum tepat, sehingga penanganan kasus gizi buruk belum disesuaikan dengan kondisi bayi gizi buruk untuk menentukan apakah anak perlu rawat inap atau rawat jalan.
- Pelayanan yang belum terintegrasi. Di mana penanganan kasus gizi buruk merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan kesehatan yang ada.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Pelayanan rawat jalan dalam penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk di Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh?

3. Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis pelayanan rawat jalan dalam penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk di Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh.

4. Manfaat Penelitian

Hasil temuan pada saat penelitian dilakukan, kiranya dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

- Manfaat Teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sebagai bahan acuan/perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan bidang pelayanan publik
- Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah terutama mengenai masalah pelayanan administrasi kesehatan masyarakat, khususnya pelayanan prosedur penanggulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk melalui rawat jalan di Puskesmas Desa Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh.

B. KERANGKA TEORI & METODOLOGI

1. Kerangka Teori

a. Pelayanan Publik

Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparaturnya sebagai abdi

masyarakat di samping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*), (Ratminto, 2006:14). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pelayanan publik sebagaimana digambarkan tersebut, dapat ditelaah bahwa pelayanan publik merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, di samping sebagai abdi negara. Agar terciptanya keseragaman bentuk dan langkah di bidang pelayanan umum oleh aparatur pemerintah, perlu adanya suatu landasan yang bersifat umum dalam bentuk pedoman tatalaksana pelayanan umum. Dengan demikian kebutuhan para penerima layanan harus dipenuhi oleh pihak penyelenggara pelayanan agar para penerima layanan tersebut memperoleh kepuasan.

b. Tolak Ukur/Indikator Pelayanan Publik

Tolak ukur pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, penampilan aparat yang menarik di mata pengguna jasa, seperti seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat, (Sea, 2009:116).

Pelayanan kesehatan tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah yang berkewajiban dan bertanggung jawab masalah kesehatan masyarakat. Salah satu wadah pelayanan kesehatan masyarakat adalah melalui pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok serta juga membina peran serta masyarakat. Pelayanan kesehatan yang dilakukan puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kuratif (pengobatan), preventif (pencegahan), promotif (peningkatan kesehatan) dan rehabilitatif (pemukiman kesehatan).

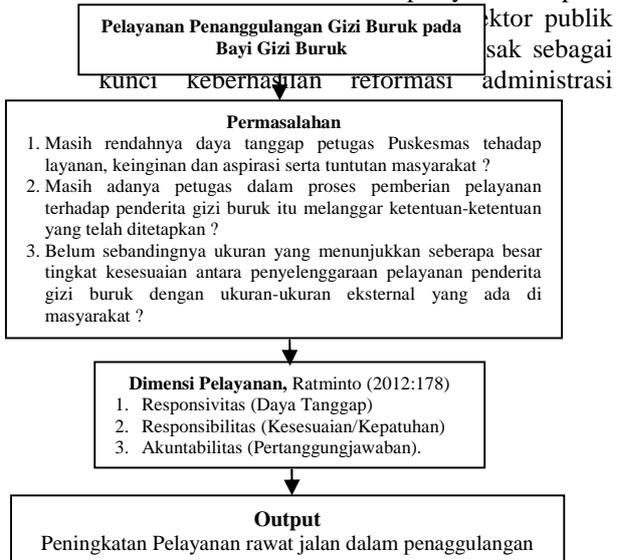
c. Dimensi Pelayanan Publik

Pelayanan merupakan terjemahan istilah "excellent service" yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut sangat baik atau terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Agenda perilaku pelayanan sektor publik.

Berbeda dengan pendapat Lenvinne (dalam Ratminto, 2012:178) yang mengatakan terdapat tiga dimensi pelayanan yang berorientasi pada proses yaitu:

1. *Responsivitas*, yaitu mengukur daya tanggap penyedia layanan terhadap layanan, keinginan dan aspirasi serta tuntunan *customers*
2. *Responsibilitas*, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3. *Akuntabilitas*, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Ratminto mengenai pelayanan yang berorientasi kepada proses, merupakan pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen. Tujuan pelayanan adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada



Gambar: kerangka pemikiran

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2010:29) penelitian deskriptif, adalah menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan secara apa adanya, selanjutnya ditarik kesimpulan, guna mendapatkan suatu teori dan lebih mementingkan proses daripada hasil.

Lokasi penelitian yaitu di Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Subjek penelitian adalah Kepala Puskesmas (1 orang), Kepala Desa Purun Kecil (1 orang), Bidan (2 orang), Para medis (2 orang), Petugas Gizi (4 orang) dan ibu bayi (3 orang). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan mendokumentasikan beberapa obyek yang menjadi bahan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Responsivitas (Daya Tanggap)

Responsivitas pelayanan penanganan gizi buruk pada bayi gizi buruk merupakan kesanggupan petugas Puskesmas membantu dan menyediakan pelayanan yang cepat, tepat serta tanggap terhadap keinginan masyarakat yang mengalami gizi buruk dengan tanpa pamrih. Tindakan petugas tanpa pamrih tersebut, tercermin dari cara melayani masyarakat khususnya bayi gizi buruk yang menderita gizi buruk diselenggarakan secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, dan tanpa mengharap balas jasa berupa biaya tambahan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bidan Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil, diperoleh keterangan bahwa:

Masih banyaknya kasus gizi buruk, menunjukkan bahwa asuhan gizi di tingkat keluarga belum memadai. Oleh sebab itu diperlukan upaya pemberdayaan melalui pendampingan. Pendampingan kepada keluarga yang mengalami gizi buruk merupakan proses mendorong, menyemangati, membimbing dan memberikan kemudahan oleh kader pendamping kepada keluarga melalui rawat jalan, guna mengatasi masalah gizi buruk yang dialami masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil.

Kemudian fungsi Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil, adalah sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sebagai bentuk dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dapat diwujudkan dengan: menggerakkan pembangunan kecamatan yang berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat

dan keluarga untuk hidup sehat, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau dan memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

Lebih lanjut keterangan diperoleh dari Petugas Gizi di wilayah kerja Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil, menyatakan bahwa:

Bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas dalam menanggulangi kasus gizi buruk kepada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil meliputi Pengobatan, Pencegahan, Peningkatan Kesehatan dan Pemulihan kesehatan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan petugas Puskesmas Rawat jalan dalam rangka menanggulangi gizi buruk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil sesuai dengan kemampuan tenaga dan fasilitas yang digunakan, maka kegiatan yang dapat dilaksanakan juga berbeda. Kegiatan pokok yang sudah ditetapkan meliputi: melaksanakan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana dan perbaikan gizi, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan penyuluhan kesehatan masyarakat dan melaksanakan pengobatan rawat jalan.

2. Responsibilitas (Kesesuaian/Kepatuhan)

Ketepatan sasaran dan sistem pelaksanaan pelayanan penanggulangan gizi buruk pada Bayi gizi buruk yang belum mengarah sepenuhnya sesuai rencana di wilayah kerjanya menjadi faktor hambatan yang terjadi dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk peduli terhadap masalah gizi dan kesehatan. Merencanakan dan menerapkan keluarga sadar gizi khususnya berkaitan dengan meningkatkan status gizi bayi gizi buruk pada keluarga miskin.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bidan di wilayah kerja Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil, menyatakan bahwa:

Responsibilitas pelayanan yang dilakukan petugas Puskesmas sudah maksimal, akan tetapi terkadang seorang ibu yang mempunyai hubungan yang lebih dekat dan erat dengan si anak sering sangat menentukan. Ada kalanya seorang ibu bersifat masa bodoh terhadap kesehatan anaknya, sehingga si ibu tersebut tidak peduli apakah makanan dan minuman yang diberikannya pada si anak termasuk makanan yang bersih dan sehat serta mengandung gizi yang tinggi. Perilaku seorang ibu tersebut, tentunya sulit tercipta dan terpelihara kesehatan yang baik dalam rumah tangganya.

Kemudian informasi yang diperoleh dari Kepala Puskesmas bahwa;

Kegiatan posyandu yang dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil sudah dilaksanakan secara rutin yaitu sekitar 1 bulan sekali, sehingga kegiatan pelayanan penanggulangan gizi buruk terhadap Ibu dan Anak (KIA) dapat terlaksana, sementara kehadiran para ibu-ibu untuk memeriksa bayi dan anak balitanya sangat jarang, sehingga pemeriksaan terhadap ibu-ibu hamil sulit dilakukan secara medis.

Berdasarkan pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa tanggungjawab pelayanan penanggulangan gizi buruk. maka petugas dituntut memiliki kompetensi yakni kemampuan petugas untuk mengetahui dan memenuhi proses pelayanan yang dibutuhkan masyarakat

3. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban)

Akuntabilitas pelayanan merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh masyarakat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ibu yang memiliki bayi dan bali yang mengalami gizi buruk, diperoleh keterangan bahwa:

Di lihat dari akuntabilitas pelayanan penanggulangan gizi buruk yang dilakukan oleh petugas belum sesuai dengan harapan. artinya akses pelayanan yang dilakukan pada kenyataannya belum merata. Di samping itu, dalam pelaksanaannya juga ditemui banyak kendala terutama dalam ketepatan waktu dan keseriusan dalam memberikan pelayanan penanggulangan gizi buruk kepada bayi gizi buruk di wilayah kerja Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil menyatakan bahwa:

Akuntabilitas pelayanan penanggulangan gizi buruk kepada bayi gizi buruk dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat belum sepenuhnya mengacu kepada SPM yang harus diterapkan di desa terutama dalam hal:

- Perhitungan kebutuhan pelayanan gizi sesuai dengan standar pelayanan minimal
- Penyusunan rencana kerja dan pencapaian target standar pelayanan minimal
- Penilaian pengukuran kinerja
- Penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat terutama untuk bayi gizi buruk serta ibu yang menyusui.

Berdasarkan hasil pengamatan, menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan penanggulangan gizi buruk, melalui pelayanan perawatan gizi buruk, belum teralisasi sesuai dengan harapan masyarakat malu untuk pergi ke Posyandu. Faktor

pelayanan, seperti pelayanan kurang memberikan motivasi, kurang adanya penyuluhan dan pelayanan tidak rutin. Faktor sarana seperti sarana yang tersedia banyak yang rusak. Faktor pendanaan dana yang tersedia terbatas.

Karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti faktor kader seperti jumlah kurang, tidak terlatih, sibuk, reward tidak ada dan sering tidak datang. Faktor masyarakat, seperti tidak peduli kurang mendapatkan informasi, tergolong keluarga miskin, merasa minder atau malu untuk pergi ke Posyandu. Faktor pendanaan dana yang tersedia terbatas.

D. PENUTUP

1. Simpulan

pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk oleh Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh, belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan beberapa kendala diantaranya:

- Responsivitas atau daya tanggap pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk yang dilakukan oleh petugas Puskesmas terlihat belum maksimal. Hal tersebut ditandai dengan ketidak-mampuan petugas atau kader Posyandu dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat yang mengalami kasus gizi buruk;
- Responsibilitas (kesesuaian/kepatuhan) petugas dalam memberikan pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk belum optimal. Hal tersebut terlihat masih ada masyarakat yang mengalami gizi buruk yang ada belum dapat memperoleh informasi yang cukup mengenai program tersebut;
- Akuntabilitas atau pertanggungjawaban petugas dalam memberikan pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk belum sepenuhnya memberikan pertanggungjawaban yang maksimal. Hal tersebut terlihat salah satunya disebabkan adanya perbedaan pelayanan yang mencolok antara masing-masing masyarakat desa dalam pelaksanaannya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

- Dalam rangka meningkatkan responsivitas pelayanan di Puskesmas Desa Sungai Purun Kecil sebagai pelaksana pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk, sedapat mungkin pihak-pihak yang terlibat melakukan penyusunan program tersebut, seperti kader (jumlahnya harus ditambah, tenaga yang terlatih dan mempunyai keterampilan dan disiplin waktu dalam

- memberikan pelayanan)
- b. Dalam rangka meningkatkan responsibilitas pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk, maka petugas Puskesmas perlu melakukan sosialisasi bersama-sama dengan kader Posyandu atau pihak desa, agar dengan melalui sosialisasi tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama mempunyai kepedulian terhadap masalah gizi dan kesehatan masyarakat (balita, ibu hamil dan ibu menyusui).
- c. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelayanan penanggulangan Gizi Buruk pada Bayi gizi buruk, maka petugas dan kader Posyandu dapat menjalankan peranannya dengan baik sesuai dengan tanggungjawabnya dan dapat menginformasikan kepada masyarakat, perlu peningkatan pengetahuan petugas atau kader, perlu dukungan masyarakat setempat, perlu dukungan pemerintah desa, perlu adanya kepedulian tokoh masyarakat, adanya pendanaan yang dapat meninjang pelaksanaan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK). Yogyakarta: UGM.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaharuan.
- Moenir, A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik & Costomer Satisfaction*. Bandung: Alumni.
- Ratminto. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Putra, Fadillah dan Arif, Saiful. 2005. *Kapatilasime Birokrasi, Kritik Reinventing Government Osborne-Gaebler*. Yogyakarta: LKIS.
- Sea, Niki. 2009. *Undang-Undang 4 Tahun 2009*. Jakarta: CV. Eka Jaya.
- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokrowinoto, Moelyarto. 2005. *Birokrasi dalam Polemik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.

Dokumen Pemerintah:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Upaya Perbaikan Gizi*
- Depkes RI. 2014. *Prosedur Dasar Pelayanan di Puskesmas*. Jakarta: Pusdiklat.
- , 2014. *Pedoman Pendampingan Keluarga Menuju Kadarzi*. Jakarta: Bhakti Husada.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Agustinus alhendra
 NIM / Periode lulus : E21112014 / III (tiga)
 Tanggal Lulus : 15 Maret 2017
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / IAN
 Program Studi : IAN
 E-mail address/ HP : alhendraagus@gmail.com / 081250235142

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Pelayanan Perangkulangan gizi buruk pada bayi gizi buruk
 dipuskesmas desa Putun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh
 Kabupaten Mempawah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/di setujui
 Pengelola Jurnal

Dr. Dardian M. AB
 NIP. 1972090520071003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 5 Mei 2017

Agustinus alhendra
 NIM. E21112014

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)